

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta. Armai, 2014.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media, 2007.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Hukum Pengadaan Tanah: Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Gunanegara. *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Tatanusa. 2008.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hidayat, Arief. *Kebebasan Berserikat Di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Iskandar, Mudakir. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Bandar Maju, 2004.
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2016.
- Nasihuddin, Abdul Aziz dkk. *Teori Hukum Pancasila*, Purwokerto: Elvaretta Buana, 2024.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah*, Cetakan ke-4, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Santoso, Urip. *Perolehan Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2010.
- Sugianto, Thoyib. *Hukum Agraria*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Cet. V*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suteki dan Gilang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Suyanto, *Hapusnya Hak atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Cetakan ke-3, Jakarta: Permata Aksara, 2015.
- Tehupeiory, Aartje. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

B. Jurnal Ilmiah dan Artikel

- Akhmaddhian, S., & Dede Yusuf. "Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Negara". *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10 No. 02 (31 Desember 2019) <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2404>
- Anisyanawati, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, & Hemmalika alyanti Chandra. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2 No. 01. (28 Juni 2025), 8. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>.

- Devi, Chintya. “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1 No. 1 (28 April 2021); <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>
- Joesoef, I. E. Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Masalah-Masalah Hukum* 50, No 3, (31 Juli 2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.318-330>
- Kasenda, Dekie GG. “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2, (16 Desember 2017); <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/28>
- Khoirurozy, M Ongko & Sutrisno. “Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Bundaran Dolog”, *Wijaya Putra Law Review* 4, No. 1, (30 April 2025) <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.229>
- Langelo, Rosana Dewi. “Penetapan Lokasi dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (23 Juli 2020) <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i2.175>
- Manurung, S., Laksmiana, R., & Prasetyo, P. K. “Problematisasi Konsinyasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder di Kabupaten Gresik”. *Tunas Agraria*, 2 No. (16 Januari 2019). <https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.21>
- Muzakki, Mochammad Alfi & Ismail Navianto. “Ratio Decidendi Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/PID/2010)”, (Malang, Universitas Brawijaya, 2014) hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/462/457
- Permanasari, Nur Indah & Gunanegara. “Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol”, *Notary Journal* 3 No.2, (30 Oktober 2023) <https://doi.org/10.19166/nj.v3i2.7070>
- Rohaedi, E., dkk.,. “Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review* 5, no. 1, (14 Juni 2019) doi: [10.33751/palar.v5i2.1192](https://doi.org/10.33751/palar.v5i2.1192)
- Sari, Fary Fitriana Gita & Irene Eka Sihombing. “Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan tanah di Bawah 5 (lima) Hektar di Kota Bekasi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Instalansi Pengelolaan Air (IPA))”, *Amicus Curiae* 1, No. 2, (28 Januari 2025) DOI: [10.25105/amicus.v1i2.19741](https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.19741)
- Setiawan, Eileen Gani. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Sebagai Dasar Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener (Studi Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 1382 PK/PDT/2022)," *Indonesian Notary* 7 No. 5, (31 Maret 2025)
DOI: <https://doi.org/10.21143/notary.vol7.no1.77>

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica* 10, No. 2 (Agustus 2013) <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>

Subekti, Rahayu. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Yustisia* 5, No. 2 (Mei - Agustus 2016); <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>

Syahroni, Nurul Khomariyah & Gunanegara. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Kembali Sertipikat Atas Nama Pihak Ketiga Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Notary Journal* 2, no. 2 (29 Oktober 2022) <https://doi.org/10.19166/nj.v2i2.5766>

Tanzili, Mulyadi. "Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum", *Jurnal Varia Hukum* 28, No. 34 (1 September 2017) <https://doi.org/10.32502/jvh.v28i34.948>

Thenata, Putu Davis Justin, dkk., "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pertanahan Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Prancis.," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (16 Desember 2024) <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1857>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. UU No. 5, LN No. 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU No. 2, LN No. 22 Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU No. 6, LN No. 41 Tahun 2023.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. PerPres No. 71, LN. 156 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PP No. 39, LN No. 102 Tahun 2023